

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Kabupaten Sumenep ada beberapa Satuan Kerja (Satker) yang salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Satuan Kerja merupakan sebuah unit organisasi yang menjalankan kegiatan pemerintahan yang sudah terprogram agar berjalan dengan baik. Namun, berjalannya waktu Dinas Komunikasi dan Informatika banyak mengalami perubahan baik dari segi kelembagaan maupun dari segi nama lembaga. Awalnya sebelum menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disingkat DISKOMINFO, lembaga ini berasal dari Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Sumenep.

“Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan mulai ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Badan Komunikasi dan Informatika atau yang disingkat (BAKOMINFO) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika atau yang disingkat (DISKOMINFO). Selaku pelaksana otonomi Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep[1]”.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika ada beberapa tugas yang dikerjakan tiap tahun diantaranya program kagiatan yang langsung terjun ke masyarakat, pelatihan, atau pemutaran film dll. Program kegiatan diadakan setiap bidang dan mengajukan anggaran agar dana kegiatan yang dibutuhkan turun untuk melancarkan kegiatan tersebut.

Secara umum anggaran merupakan suatu perkiraan atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran dilakukan untuk rencana kegiatan di masa mendatang. “Menurut Bastian (2006) anggaran adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang[2]”.

Pengelolaan anggaran merupakan suatu kegiatan administrasi dalam pemerintahan yang menuntut bentuk tata kelola yang baik dan setiap organisasi harus melakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan secara transparan. Transparansi dalam penggunaan anggaran sangat dibutuhkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengoptimalkan

pengelolaan anggaran pengguna anggaran harus mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku.[3].

Secara umum lingkup untuk penatausahaan pengeluaran anggaran dilimpahkan diantaranya Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan Nota Pencairan Dana (NPD). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdapat SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-GU (Ganti Uang), SPP-TU (Tambahan Uang), SPP-LS (Langsung), SPP-LS Gaji dan Tunjangan, SPP-LS Barang dan Jasa. Surat Perintah Membayar (SPM) terdapat SPM-UP (Uang Persediaan), SPM-GU (Ganti Uang), SPM-TU (Tambahan Uang), SPM-LS (Langsung), SPM-LS Gaji dan Tunjangan, SPM-LS Barang dan Jasa[4].

Namun sistem ini lebih dikhususkan pada pengelolaan anggaran tiap bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika hanya terdiri dari beberapa tahapan diantaranya, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disahkan sebagai dasar dalam pembuatan NPD (Nota Pencairan Dana), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

Permasalahan yang sering terjadi pada proses pengelolaan anggaran adalah kesalahan pada perhitungan data-data pengeluaran anggaran, dikarenakan tidak ada laporan yang otomatis dicetak, masih dihitung secara manual yang membutuhkan berkas-berkas sebelumnya. Pada rekap laporan akhir belum ada, sehingga pembuatan laporan masih sebatas kebutuhan saja, belum ada laporan yang jelas. Jadi kalau misalnya pimpinan minta laporan pertriwulan atau persemester masih harus menghitung dengan manual, belum ada laporan otomatis yang langsung tinggal dicetak. Proses perhitungan penerimaan dan pengeluaran transaksi masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terjadi kesalahan perhitungan dan kerjanya cukup memakan waktu. Dari kesalahan diatas akan menghambat proses dalam pengajuan dana dan pembuatan laporan.

Pengguna sistem informasi ini dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dalam pengelolaan anggaran, sehingga semua tahapan kegiatan dapat diterjemahkan ke dalam aplikasi dengan baik. Aplikasi ini berbasis web untuk memudahkan pengguna dalam proses pengajuan dana dan pembuatan laporan pengelolaan anggaran yang bisa dikerjakan lebih mudah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menuangkan dalam sebuah judul “Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Berbasis Web”. Ini dibuat pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumenep. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah dalam pengajuan dana dan pembuatan laporan pengelolaan anggaran yang lebih cepat serta menghasilkan informasi yang akurat, efisien, dan tepat waktu.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat laporan dan rekap laporan pada tiap bidang secara otomatis yang siap cetak?
2. Bagaimana laporan pengelolaan anggaran menjadi lebih mudah dan cepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat, efisien, dan tepat waktu ?
3. Bagaimana merancang dan membangun sistem pengelolaan anggaran dengan menggunakan *Framework Codeigniter* yang berbasis MVC?

1.3 Tujuan dan Manfaat

❖ Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Membangun sebuah sistem pengelolaan anggaran dengan menyediakan laporan dan rekap laporan tiap bidang yang siap cetak secara otomatis.
2. Membangun sebuah sistem pengelolaan anggaran yang lebih mudah, cepat, akurat, dan tepat waktu.
3. Membangun sistem pengelolaan anggaran dengan menggunakan *Framework CodeIgniter* yang berbasis PHP dan model MVC.

❖ Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menghasilkan perancangan aplikasi sistem informasi pengelolaan anggaran dengan mengetahui laporan dan rekap laporan tiap bidang.
2. Menghasilkan sistem pengelolaan anggaran yang lebih mudah dan cepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat, efisien, dan tepat waktu.
3. Dengan menggunakan *framework codeigniter* konsep MVC sistem pengelolaan anggaran akan lebih terstruktur.

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

2. Pengajuan dana dari tiap bidang, yaitu (Keseekretariatan, komunikasi, Informasi, Pos Telekomunikasi, Aplikasi Telematika).
3. Data laporan pengelolaan anggaran secara keseluruhan pada tiap bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam merancang dan membuat Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Berbasis Web. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisa PIECES

Analisa PIECES (*Performance Informtion Economic Control Efficiency Service*) terdiri dari berbagai macam tujuan. Adapun permasalahan yang terjadi pada sistem pengelolaan anggaran tersebut adalah :

- a. *Perfomance*

Kinerja yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan anggaran dalam proses pengajuan dan pembuatan laporan, sehingga sistem mampu menyelesaikan tugas dengan cepat, akurat, dan tepat waktu.

- b. *Information*

Informasi merupakan hal penting yang dibutuhkan pengguna sistem, sehingga pengguna dengan mudah dapat mencari data pengelolaan anggaran dalam pembuatan laporan DPA, NPD, dan SPP.

- c. *Economic*

Pemanfaatan biaya yang digunakan dari pemanfaatan informasi cukup menguntungkan karena data tersimpan kedalam database dan mengurangi penyimpanan berkas yang membutuhkan biaya banyak.

- d. *Control*

Membandingkan sistem pengelolaan anggaran dari segi analisa ketepatan waktu, akurat, dan cepat dalam mengakses data. Sehingga segala permasalahan dapat diperbaiki.

- e. *Efficiency*

Efisiensi yang berhubungan dengan data yang dapat digunakan secara optimal. Data akan lebih mudah, cepat, dan akurat dengan pengoprasian sistem pengelolaan anggaran.

f. *Service*

Sistem pengelolaan anggaran ini dapat meningkatkan para pegawai dalam proses pengajuan anggaran belanja dan pembuatan laporan. Sehingga pegawai dapat dengan cepat dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya.

2. Tahap *Survey*

Pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang pengelolaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep. *Survey* ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Studi Literatur

Proses dalam pencarian referensi yang dibutuhkan dalam merancang sistem. Referensi yang dikumpulkan berupa penjelasan tentang pengelolaan anggaran dan analisis penelitian sebelumnya tentang pengelolaan anggaran. Pembelajaran dilakukan melalui jurnal, buku, internet, dan tentang pengelolaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

4. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tentang Data Administrasi Pengelolaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika serta data yang berhubungan dengan kebutuhan laporan pengelolaan anggaran. Data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dan observasi.

5. Analisis Sistem

Tahap analisa ini dilakukan analisis pada sistem yang akan di implementasikan, yaitu :

- a. Kebutuhan user untuk melakukan intraksi pada sistem.
- b. Membuat dan mendesain perancangan sistem dengan menggunakan *Data Flow Diagram* (DFD) dan *Unified Modeling Language* (UML).
- c. Mendesain sistem dan merancang database

6. Perancangan Sistem

Pada perancangan sistem ini menjelaskan konsep dasar tentang sistem yang akan dibuat mencakup deskripsi pada sistem yang akan dibuat. Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisa kebutuhan yang akan dibutuhkan untuk mendukung perencanaan sistem tersebut, kemudian menggambarkan konsep dasar informasi pengelolaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

7. Implementasi Sistem

Pada sistem informasi pengelolaan anggaran dibangun *user interface* dan pengkodean program yang sudah dirancang sebelumnya. Terdapat 4 level hak akses pada sistem ini yaitu : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang (5 user tiap bidang), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Bidang (5 user tiap bendahara bidang). Sistem ini menyediakan form laporan tiap bidang dan form rekap laporan kegiatan. Tahap ini akan mengimplementasikan rancangan sistem yang sudah dibuat dalam bentuk aplikasi.

8. Pengujian Sistem

Tahap ini merupakan tahap pengujian sistem pada sistem informasi pengelolaan anggaran dalam pengajuan dana dan pembuatan laporan kegiatan. Pengujian ini akan dilakukan apabila sistem sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila ada kekurangan pada sistem tersebut, maka akan dilakukan pengecekan serta perbaikan pada sistem. Sistem akan mengulang tahap implementasi setelah sistem sudah benar-benar siap digunakan lagi.

9. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahap akhir dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. Laporan ini dibuat untuk mempermudah dan menjelaskan aplikasi yang dibuat, sehingga akan memudahkan orang lain untuk mengembangkan aplikasi tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Ada 5 bab penulisan laporan tugas akhir yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir.

BAB II STUDI PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar untuk menunjang pembuatan aplikasi dalam penelitian tugas akhir. Pustaka yang digunakan terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang kebutuhan sistem, alur rancangan sistem, dan desain sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

Bab bagian ini berisi tentang implementasi aplikasi yang dibuat, sistem di uji coba berdasarkan dengan memasukkan data, sehingga keakuratan informasi dapat diketahui.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil uji coba sistem yang dibuat dan saran untuk pengembangan sistem berikutnya.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]